Analisis Framing Pada Pemberitaan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/Hum/2024 Tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah Di Media Online Detik.Com

Nurul Lutfia Maryadi¹, Chika Syaharani Putri², Azahra Kaulika Irawansyah³, Haris Rizki Saputra⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Jakarta, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Indonesia,
Email: nurulutfia25@gmail.com

ABSTRACT

This article aims to analyze the framing of news coverage concerning the Supreme Court (MA) Decision No. 23 P/HUM/2024 in the online media Detik.com. The research employs framing analysis methodology to understand how Detik.com frames this news. This method involves literature review and secondary data collection from articles published by Detik.com, chosen for its significant influence on shaping public opinion as a leading news portal in Indonesia. The framing analysis focuses on examining elements such as headlines, news content, quotes, and sources, as well as the background and chronology of events. The primary focus is to explore how the news about MA Decision No. 23 P/HUM/2024 is constructed through word choice, use of quotes, and emphasis on specific aspects of the case. This research also aims to identify any bias or tendencies in the reporting and assess its impact on public perception. The findings are expected to provide in-depth insights into the media's role in reporting significant legal decisions and their implications for information transparency and democracy.

Keywords: Analysis Framing; News; Media Online; Supreme Court; Framin

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis framing pada pemberitaan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 di media online Detik.com. Penelitian ini menggunakan metode analisis framing untuk memahami bagaimana Detik.com membingkai berita tersebut. Metode ini melibatkan studi literatur dan pengumpulan data sekunder dari artikel berita yang dipublikasikan oleh Detik.com, yang dipilih karena reputasinya sebagai salah satu portal berita terkemuka di Indonesia dengan pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Analisis framing dilakukan dengan menelaah elemen-elemen berita seperti judul, isi berita, kutipan, dan narasumber, serta latar belakang dan kronologi peristiwa. Fokus utama analisis ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana berita mengenai putusan MA No 23 P/HUM/2024 dikonstruksi melalui pemilihan kata, penggunaan kutipan, dan penekanan pada aspek-aspek tertentu dari kasus tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bias atau kecenderungan dalam pemberitaan dan mengevaluasi dampaknya terhadap persepsi publik. Temuan dari analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang peran media dalam melaporkan keputusan hukum penting serta implikasinya terhadap transparansi informasi dan demokrasi.

Kata-kata Kunci: Analisis Framing; Berita; Mahkamah Agung; Media Online; Pembingkai

Korespondensi: Nurul Lutfia Maryadi, Chika Syaharani Putri, Azzahra Kaulika Irawansyah, Haris Rizki Saputra, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jl. Ir H. Juanda No.95, Ciputat, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15412.

No. HP, WhatsApp: 085888558344 Email: nurulutfia25@gmail.com

Submitted: Juli 2024 | Accepted: Juli 2024 | Published: Juli 2024

P-ISSN 2620-3111 | E-ISSN 2685-3957 | Website: <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jika/>

PENDAHULUAN

Pada dasarnya pekerja media tugasnya adalah mengkonstruksi sebuah realitas, baik realitas politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Media menjadi aktor utama yang memegang peran penting dalam menjembatani informasi politik kepada masyarakat selaku pemilik suara. Terlebih di era serba modern ini dengan teknologi canggih membuat media massa semakin cepat dalam memproduksi dan menayangkan berita. Media juga diyakini dan diharapkan mampu memberi gambaran sudut pandang yang adil serta netral terkait segala persoalan yang terjadi di tingkat nasional maupun internasional (Miftajanna, 2022).

Media tentunya mempunyai cara tersendiri dalam membingkai sebuah isu, termasuk isu politik. Maka dalam penelitian ini membahas mengenai analisis framing berita putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 yang menjadi perhatian, karena diduga menguntungkan salah satu pihak. Pemberitaan di berbagai media tentu memiliki tujuan yang hendak disampaikan oleh penulis maupun media kepada pembaca, baik dengan tujuan sebagai informasi, cermin realitas, dan lain-lain sebagainya. Sehingga masyarakat yang awam tentu tidak sadar bahwa sebuah realita dibangun oleh media massa melalui proses konstruksi agar menciptakan persepsi yang sejalan dengan yang ditampilkan oleh media (Ayudia, dkk, 2024).

Analisis framing merupakan sebuah analisis yang memperhatikan bagaimana media mengemas dan membingkai sebuah berita. Proses framing dimulai dengan memilih sebuah peristiwa tertentu untuk diberitakan dan menekankan aspek tertentu dari peristiwa tersebut melalui kata demi kata, aksentuasi, gambar, dan perangkat lainnya (Febriyanti & Karina, 2021).

Indonesia sebagai negara demokrasi tentunya menjunjung tinggi hak individu dalam memilih pemimpin mereka. Proses demokrasi yang berlangsung di Indonesia menunjukkan seberapa siap negara ini memberikan kebebasan hak memilih kepada warga negara Indonesia untuk merayakan pesta demokrasi dan pembentukan pemerintahan. Antusiasme warga menunjukkan bahwa masyarakat melek akan tanggung jawab mereka untuk lima tahun kedepannya (Irawan & Tripalupi, 2024).

Keterlibatan suatu negara bisa terwujud dengan baik dengan hadirnya landasan hukum. Landasan hukum meliputi serangkaian peraturan yang telah ditentukan agar mencapai suatu tujuan. Landasan hukum tersebut dituangkan melalui sebuah konstitusi. Konstitusi tersebut mengatur sistem politik dari hasil pembentukan pemerintahan suatu negara yang dimasukkan dalam undang-undang sebagai sebuah dokumen tertulis yang memuat aturan dan prinsip entitas politik dan hukum (Adilla, dkk, 2024).

Pemberitaan tentang putusan Mahkamah Agung (MA) selalu menjadi topik yang menarik perhatian publik, terutama ketika keputusan tersebut memiliki dampak signifikan terhadap politik dan pemerintahan. Salah satu putusan yang baru-baru ini menjadi sorotan adalah putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024, yang memungkinkan Kaesang Pangarep, putra Presiden Joko Widodo, untuk mencalonkan diri sebagai gubernur dalam Pilkada 2024. Keputusan ini tidak hanya mengundang berbagai reaksi dari kalangan politik dan masyarakat, tetapi juga menjadi bahan pemberitaan utama di berbagai media, termasuk media online Detik.com. Pendekatan analisis framing ini memungkinkan kita untuk memahami isu pencalonan Kaesang Pangarep dengan lebih mendalam. Hal ini dilakukan dengan meneliti konteks di balik pencalonan tersebut, serta tanggapan dan tindakan yang dapat diambil publik terhadap informasi tersebut.

Sebagai salah satu portal berita terbesar di Indonesia, Detik.com dalam beritanya yang berjudul “Aturan Baru Batas Usia Cagub-Cawagub Usai Putusan MA” memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana Detik.com memberitakan putusan MA ini dan apakah pemberitaannya bersifat objektif dan pro publik atau justru mempromosikan kepentingan media itu sendiri. Berita memiliki peran penting dalam membentuk realitas tentang suatu isu atau peristiwa (Aryawan, 2023). Hal ini dikarenakan berita merupakan hasil dari proses konstruksi sosial, di mana jurnalis dan media menyusun informasi dan menyajikannya dengan cara tertentu, sehingga memengaruhi pemahaman publik.

Dalam konteks ini, analisis framing menjadi alat yang efektif untuk mengeksplorasi bagaimana bahasa dan struktur berita digunakan untuk membingkai isu tersebut. Artikel ini akan mengkaji pemberitaan Detik.com tentang putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 dengan menggunakan metode framing. Pendekatan ini akan membantu mengungkap agenda tersembunyi dan ideologi yang mungkin ada di balik pemberitaan tersebut. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang peran media dalam proses demokrasi dan bagaimana media dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap isu-isu penting.

Analisis framing merupakan sebuah metode untuk memahami bagaimana realitas dikonstruksi dan dikomunikasikan melalui bahasa (Seidel, 2011). Dalam konteks media, framing mengacu pada cara jurnalis dan media menyeleksi dan menyajikan informasi, sehingga memengaruhi persepsi dan interpretasi publik terhadap suatu isu (Van Gorp & Van Hoof, 2008).

Analisis framing pada dasarnya merujuk pada suatu permasalahan. Oleh karena itu, dalam konsep framing terdapat dua dimensi besar, yaitu pemilihan isu dan penonjolan aspek tertentu pada suatu permasalahan atau isu (Eriyanto, 2018). Menurut Eriyanto, jurnalis akan menggunakan perspektif tertentu dalam melihat sebuah peristiwa. Ketika membaca suatu berita semua akan kembali kepada ideologi. Proses berita pada dasarnya memang sebagian besar didasari oleh pergabungan realitas yang menjadikan informasi tersebut. Oleh karena itu, media merupakan tempat yang sangat cocok untuk memberikan berita. Selain itu, media juga banyak menggunakan framing atau pembingkai untuk menonjolkan suatu aspek penting tertentu dari realitas yang ada sehingga dengan menggunakan pembingkai dapat mengalihkan perhatian dari sebuah isu yang lain (Bimo Nugroho, Eriyanto, Frans Surdiasis, 1990).

Dengan menganalisis framing, kita dapat menelusuri bagaimana media memanipulasi makna dan realitas, sehingga mengarahkan opini publik ke arah tertentu (McCombs & Shaw, 1972). Hal ini menjadi krusial dalam konteks demokrasi, di mana media memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan informasi yang objektif dan netral, agar publik dapat membuat keputusan yang rasional dan bertanggung jawab.

Adapun, tujuan dari penelitian ini tidak hanya relevan bagi akademisi dan praktisi media yang ingin memahami strategi framing media, tetapi juga bagi masyarakat luas yang ingin menjadi konsumen media yang cerdas dan kritis. Dengan memahami bagaimana media membingkai isu, masyarakat dapat terhindar dari manipulasi informasi dan mampu membangun opini publik yang sehat.

Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada wacana yang lebih luas tentang etika jurnalistik, transparansi, dan akuntabilitas media dalam menyajikan berita yang berdampak besar pada publik. Di era demokrasi yang kian dinamis, peran media dalam menyampaikan informasi yang objektif dan berimbang menjadi semakin vital untuk membangun masyarakat yang cerdas dan partisipatif.

Objek penelitian ini adalah berita terkait putusan Mahkamah Agung (MA) di media *online* Detik.com. Pertimbangan peneliti dalam pemilihan media tersebut, karena media Detik.com merupakan pelopor pertama media *online* di Indonesia. Media *online* tersebut juga mengacu pada kecepatan dan ketepatan.

Peneliti juga menggunakan teori hierarki pengaruh dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh apa yang menjadi landasan pemberitaan “Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah di Media Online Detik.com”.

Teori ini menjelaskan penyebab pembentukan konten berita di media massa saat ini. Shoemaker dan Reese (1996) mencoba mengelaborasi alasan mengapa media massa memiliki perbedaan dan persamaan dalam proses liputan maupun isi konten beritanya (Adiprasetyo, 2015). Dalam artian, teori hierarki pengaruh menjelaskan proses pembentukan berita tidak hanya terpengaruh dari wartawan maupun internal media, melainkan faktor eksternal pun dapat memengaruhi konten media massa. Shoemaker dan Reese dalam bukunya membagi ke dalam beberapa level pengaruh isi media yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan redaksi dalam proses produksi konten berita, yaitu level individu, rutinitas media, level organisasi, level ektramedia, dan level ideologi (Shoemaker & Reese, 1996: 313).

Adapun, penelitian terdahulu yang membahas analisis framing pada media online Detik.com yaitu Kajian Jurnalisme oleh Muhammad Refi Sandi, Maimon Herawati, dan Justito Adiprasetyo yang berjudul "Framing Media Online Detik.com Terhadap Pemberitaan Korban Pengeroyokan oleh Bobotoh".

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan analisis framing model Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki, yang dilihat dari struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik untuk mengetahui cara media mengkonstruksi sebuah wacana berita, dengan melakukan penonjolan tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 6 berita yang diteliti, 4 berita menonjolkan nama korban serta 2 berita yang mengandung isi yang sama hanya perubahan judul.

Literatur Review (Penelitian Terdahulu)

1. Dewi Nandini Aryawan (2024) yang berjudul Analisis Framing dalam Berita Pencalonan Kaesang Pangarep sebagai Kepala Daerah di Detik.com ditemukan hasil penelitian secara garis besar penulis berita-berita Detik.com menyatakan netralitasnya terhadap pencalonan Kaesang. Penelitian ini menggunakan Teori Analisis Framing menurut Entman. Analisis framing pada penelitian ini dilakukan untuk melihat suatu isu secara lebih rinci. Dengan melihat latar belakang adanya informasi berita hingga solusi yang dapat dilakukan khalayak untuk menanggapi informasi tersebut. Dapat disimpulkan bahwa usaha framing oleh penulis berita didukung dengan informasi dari narasumber kredibel. Oleh karena itu, portal berita mampu mempertahankan netralitasnya dengan menutupi kenyataan bahwa berita mengarah pada ketidaksiapan Kaesang Pangarep untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka hal yang berhubungan dengan

penelitian penulis, yakni media *online* dalam melakukan pemberitaan melihat suatu isu secara detail atau rinci. Hal tersebut juga menjadi faktor bagaimana media memihak pada suatu kekuasaan tertentu atau tidak.

2. Aditya Perdana dan Muhammad Imam (2024) dengan judul penelitian Judisialisasi Politik dalam Putusan MK Terkait Batas Usia Cawapres dalam Pilpres 2024. Penelitian ini mencoba memahami alasan judisialisasi dan pandangan politik terhadap sistem peradilan dan peran politik dalam putusan pengadilan mengenai putusan MK terhadap batas usia cawapres dalam pilpres tahun 2024. Hasil penelitian yang disusun oleh Aditya Perdana dan Muhammad Imam menunjukkan bahwa Putusan MK tentang batas usia Cawapres pada Oktober 2023 adalah putusan peradilan yang politis dan berat akan kepentingan satu pihak saja. Namun, dalam hal ini MK merujuk pada prinsip kebijakan hukum terbuka. Oleh karena itu, jika MK mengabaikan prinsip ini dalam persoalan usia capres dan cawapres, hakim konstitusi bisa saja diduga ada melanggar kode etik. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka hal yang berhubungan dengan penelitian penulis, yakni peran media *online* terhadap putusan MK atau MA mengenai batasan usia cawapres maupun calon gubernur tersebut ada kepentingan peran politik dalam keputusan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penulis mengambil teknik pengumpulan data studi literatur dan data sekunder, yang merupakan data hasil-hasil penelitian terdahulu yang telah dipublikasi, baik berbentuk buku, laporan penelitian, jurnal, maupun data dari internet yang bisa mendukung gambaran terkait hubungan antara teori yang digunakan dengan masalah yang akan diteliti (Sukmadinata, 2005).

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah artikel berita yang diterbitkan oleh Detik.com terkait putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024. Artikel berita ini dipilih karena Detik.com merupakan salah satu portal berita terkemuka di Indonesia yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Data primer yang digunakan terdiri dari teks berita yang mencakup informasi mengenai kasus tersebut, termasuk judul, isi berita, kutipan dari narasumber, dan komentar dari pihak-pihak terkait.

Analisis framing dilakukan terhadap elemen-elemen seperti judul berita, isi berita, kutipan, dan narasumber, serta latar belakang dan kronologi peristiwa. Judul berita dianalisis untuk melihat bagaimana konstruksinya menarik perhatian pembaca dan mencerminkan posisi atau sudut pandang media. Isi berita dianalisis mencakup bagaimana informasi disusun dan disajikan, termasuk penggunaan bahasa, struktur kalimat, dan penekanan pada aspek-aspek tertentu dari kasus tersebut. Penggunaan kutipan dari narasumber yang relevan dianalisis untuk memahami bagaimana pandangan dan pendapat dari berbagai pihak disampaikan dan bagaimana hal ini mempengaruhi framing berita. Penjelasan mengenai latar belakang kasus dan kronologi peristiwa dianalisis untuk melihat sejauh mana berita memberikan konteks yang diperlukan bagi pembaca. Selain data primer, penelitian ini juga mengacu pada literatur dan teori framing untuk mendukung analisis.

Metode yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis berita di Detik.com yang berjudul “Aturan Baru Batas Usia Cagub-Cawagub Usai Putusan MA” adalah Analisis Framing. Metode Analisis Framing secara susunan kata terdiri dari dua suku kata, yakni analisis dan framing. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis berarti sebuah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, yang telah dikaji sebaik-baiknya, penguraian suatu atas beberapa bagian, serta penguraian karya dan unsur-unsurnya guna memahami hubungan antar unsur tersebut (Sobur, 2001). Analisis framing merupakan metode yang digunakan untuk memahami bagaimana media mengkonstruksi realitas melalui pemberitaannya. Dengan metode ini, peneliti dapat mengidentifikasi struktur dan proses framing yang digunakan oleh media untuk membentuk makna dalam pikiran audiens.

Dalam konteks penelitian ini, analisis framing akan digunakan untuk melihat bagaimana pemberitaan mengenai putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 dibingkai oleh media online. Framing mencakup berbagai elemen seperti pemilihan kata, penggunaan kutipan, penekanan pada aspek tertentu dari berita, dan eksklusi elemen-elemen lainnya. Dalam analisis ini, peneliti akan menelaah pemberitaan di media online mengenai pemberitaan putusan MA No 23 P/HUM/2024 pada media online Detik.com. Melalui analisis framing ini, peneliti berharap dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai cara media membingkai pencalonan Kaesang Pangarep dalam Pilkada 2024 dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi opini publik. Analisis ini juga bertujuan untuk mengungkap bias atau kecenderungan tertentu dalam pemberitaan yang mungkin ada, serta implikasi dari

framing tersebut terhadap persepsi masyarakat. Data sekunder diperoleh dari sumber jurnal, artikel, dan referensi lainnya yang mendukung penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Detik.com

Detik.com menjadi pelopor media online di Indonesia yang lahir tanpa ada induk media cetak dan berdiri secara otonom (Margianto & Asep, 2013). Media Detik.com berusaha menyajikan berita melalui konten dan juga layanan digital. Pada 3 Agustus 2011, Detik.com secara resmi diakuisisi oleh Transmedia dibawah grup perusahaan CT Corp kepunyaan Chairul Tanjung. Detik.com mengacu kepada nilai, yaitu cepat, akurat, kreatif, inovatif, dan independen.

Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 yang mengabulkan gugatan Partai Garuda terkait batas usia calon gubernur dan wakil gubernur memiliki implikasi signifikan terhadap dinamika politik di Indonesia. Gugatan tersebut menuntut perubahan pasal 4 ayat 1 huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020, yang awalnya menetapkan usia minimal 30 tahun bagi calon gubernur dan wakil gubernur dihitung sejak penetapan pasangan calon. Melalui putusan ini, MA memutuskan bahwa usia minimal 30 tahun tersebut harus dihitung sejak pelantikan calon terpilih.

2. Hasil Penelitian

Setelah dilakukan analisis *framing* Pan Kosicki terhadap artikel berita Detik.com, ditemukan cara media Detik.com dalam mengemas pemberitaan terkait isu Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 terkait batas usia calon gubernur dan wakil gubernur.

a. Framing Berita Aturan Baru Batas Usia Cagub-Cawagub Usai Putusan MA di Detik.com

Framing merupakan sebuah cara bagaimana peristiwa disajikan oleh media. Penyajiannya dilakukan dengan menekankan bagian tertentu, menonjolkan aspek tertentu, dan membesarkan cara bercerita tertentu dari suatu realitas/peristiwa. Media menyeleksi, menghubungkan, dan menonjolkan peristiwa hingga makna sebuah peristiwa lebih mudah menyentuh dan diingat pembaca (Lugito dkk., 2022). Detik.com sebagai salah satu portal berita

terkemuka di Indonesia memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi mengenai putusan MA ini. Dalam pemberitaannya, Detik.com menyoroti beberapa aspek penting dari kasus ini, termasuk pihak-pihak yang terlibat, proses hukum yang berlangsung, dan implikasi dari putusan tersebut.

Berdasarkan unsur sintaksisnya

Terlihat dari judul berita, Detik.com menarik gambaran secara umum dengan memilih judul yang berbunyi “Aturan Baru Batas Usia Cagub-Cawagub Usai Putusan MA”. Detik.com tidak mencantumkan tendensi tertentu dalam penyusunan kata untuk *headline*.

b. Framing Berita dan Agenda Media

Paragraf 1	"Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan yang diajukan Partai Garuda terkait batas usia calon gubernur dan wakil gubernur. Kini calon gubernur dan wakil gubernur minimal berusia 30 tahun saat hari pelantikan."
Paragraf 2	"Perkara tersebut teregistrasi dengan nomor 23 P/HUM/2024. Pemohonnya adalah Ahmad Ridha Sabana dkk sementara termohonnya adalah KPU RI. Mereka mengajukan gugatan terhadap pasal 4 ayat 1 huruf d PKPU nomor 9 tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota."

Dalam analisis ini, terlihat bahwa Detik.com membingkai berita putusan MA dengan fokus pada informasi faktual dan kronologi peristiwa. Artikel tersebut menyebutkan pihak penggugat, yaitu Partai Garuda dan Ahmad Ridha Sabana, serta pihak termohon, yaitu KPU RI. Selain itu, Detik.com menjelaskan latar belakang gugatan, alasan di balik gugatan, dan respons dari Partai Garuda setelah putusan dikeluarkan.

Framing yang digunakan oleh Detik.com cenderung netral dan informatif, tanpa menunjukkan bias yang signifikan terhadap salah satu pihak. Ini mencerminkan upaya media untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepada publik. Namun, penting untuk mencermati apakah *framing* ini

juga mempertimbangkan kepentingan publik secara keseluruhan atau lebih mengedepankan agenda media dalam hal menarik perhatian dan traffic pembaca.

c. Penggunaan Kutipan dan Narasumber

Paragraf 9	"Waketum Garuda Teddy Gusnaldi menjelaskan gugatan pihaknya yang dikabulkan oleh MA. Dia mengatakan gugatan tersebut diajukan oleh Partai Garuda karena menilai isi pasal 4 ayat 1 huruf d PKPU nomor 9 tahun 2020 bertentangan dengan UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada."
------------	---

Detik.com menggunakan kutipan dari Waketum Garuda, Teddy Gusnaldi, untuk menjelaskan dasar gugatan dan alasan di balik permintaan perubahan pasal PKPU. Penggunaan kutipan ini memberikan pandangan dari pihak penggugat dan menambahkan kredibilitas pada berita yang disajikan. Namun, pemberitaan ini tidak menyertakan perspektif dari pihak termohon, yaitu KPU RI, atau pendapat dari ahli hukum yang netral. Hal ini bisa menjadi titik perhatian mengenai keseimbangan pemberitaan.

d. Dampak Putusan terhadap Pemberitaan Media

Paragraf 12	"Pihaknya pun mengajukan gugatan ke MA. Mereka meminta MA mengubah pasal tersebut agar syarat usia minimal 30 tahun tersebut terhitung sejak pelantikan calon terpilih."
-------------	--

Putusan MA yang mengubah batas usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur menjadi sejak pelantikan calon terpilih berdampak langsung pada strategi kampanye dan pencalonan di Pilkada 2024. Media, termasuk Detik.com, memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi ini dengan jelas dan tepat kepada publik agar calon pemilih memahami implikasi dari perubahan ini.

e. Kepentingan Publik vs. Kepentingan Media

Paragraf 1	"Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan yang diajukan Partai Garuda terkait batas usia calon gubernur dan wakil gubernur. Kini calon gubernur dan wakil gubernur minimal berusia 30 tahun saat hari pelantikan."
Paragraf 10	"Berikut isi pasal 4 ayat 1 huruf d PKPU 9/2020 yang digugat: Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon."

Analisis *framing* menunjukkan bahwa pemberitaan Detik.com lebih cenderung mengedepankan kepentingan publik dengan memberikan informasi yang akurat dan relevan terkait putusan MA. Namun, ada elemen yang perlu ditingkatkan, seperti penyertaan pandangan dari berbagai pihak yang terlibat dan pendapat ahli untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa media tidak hanya mengejar clickbait atau sensasionalisme, tetapi benar-benar memenuhi fungsi edukatif dan informatif bagi masyarakat.

f. Implikasi Putusan terhadap Demokrasi dan Hukum

Paragraf 13	"Ada penambahan syarat yaitu 'terhitung sejak penetapan pasangan calon'. Padahal di pasal 7 ayat 2 huruf e UU 10 tahun 2016 tidak ada syarat tersebut. Maka itu kami gugat dengan mengubah syarat tersebut menjadi Pasal 4 ayat 1 huruf d 'berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan wakil walikota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih,' ujarnya. Gugatan tersebut lah yang dikabulkan MA."
-------------	---

Putusan MA ini memiliki dampak yang luas terhadap sistem hukum dan demokrasi di Indonesia. Dengan menetapkan bahwa usia minimal dihitung

sejak pelantikan, ada perubahan dalam interpretasi hukum yang dapat mempengaruhi masa depan pencalonan di Pilkada. Media harus terus mengawal dan memberitakan perkembangan ini dengan teliti untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis framing pada pemberitaan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 di media online Detik.com, dapat disimpulkan bahwa Detik.com cenderung menyajikan informasi secara netral dan faktual. Mereka menyoroti kronologi peristiwa dan aspek-aspek kunci terkait putusan MA, termasuk pihak yang terlibat dalam gugatan, latar belakang permohonan, serta respons dari Partai Garuda setelah putusan dikeluarkan. Framing yang digunakan tidak menunjukkan bias yang signifikan terhadap salah satu pihak, yang mencerminkan upaya Detik.com untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepada publik. Namun demikian, analisis ini juga menunjukkan bahwa terdapat kekurangan dalam penyertaan perspektif dari pihak termohon, seperti KPU RI, dan kurangnya pendapat dari ahli hukum yang netral dapat menjadi titik perhatian untuk keseimbangan pemberitaan yang lebih komprehensif. Dengan demikian, meskipun Detik.com berusaha untuk mengedepankan kepentingan publik dalam pemberitaannya, peningkatan dalam inklusi berbagai sudut pandang dapat meningkatkan kualitas dan kedalaman liputan mereka terhadap isu-isu hukum dan politik yang penting bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryawan, D. N. (2024). Analisis Framing Dalam Berita Pencalonan Kaesang Pangarep Sebagai Kepala Daerah Di Detik.Com. *Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi*, 6(1), 66–67.
- Aziz, A., & Wahid, U. (2021). Analisis Framing Pemberitaan Politik Dinasti Jokowi Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Media Online Kompas.Com Dan Okezone.Com. *Jurnal Kaganga: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 1–10.
<https://doi.org/10.33369/jkaganga.5.1.1-10>
- Com, C., Batas, T., Cawapres, U. C.-, & Adilla, A. (2024). *Analisis Framing Pada Media Pemberitaan Kompas . Com Dan. 4*.
- Husein, M. I., & Lestaluhu, S. (2021). *Analisis Wacana Kritis Pada Pemberitaan Mobil Dinas Gubernur Maluku (Sebuah Tinjauan Terhadap Perspektif Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 di Harian Pagi Siwalima)*. 36–68.
- Irawan, R. E., & Tripalupi, M. F. (2024). Media Framing of Kaesang Pangarep’s PSI Chairmanship by Tribunnews.com. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 7(2), 126.

<https://doi.org/10.24198/jkj.v7i2.51400>

- Kumalawati Sarjani, D. (2023). Self Disclosure Pada Pengguna Platform Media Sosial Tanya Jawab Quora. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi Dan Informasi*, 8(1), 1–18.
- Lugito, P. J., Lesmana, F., & Wijayanti, C. A. (2022). Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Rachel Vennya Pada Kasus Karantina COVID-19 di Kompas.com dan Okezone.com. *Jurnal E-Komunikasi*, 10(2), 2–8.
- Margianto, J. H., & Syaefullah, A. (2012). Media online: Pembaca, laba, dan Etika. *Majalah Pusat Dokumentasi ELSAM*, 33.
- Puspita, T. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Melakukan Kegiatan Jurnalistik*.
- Seputar, B., Calon, P., Prabowo-gibran, P., Ayudia, A. M., Santoso, W. J., Indonesia, P. B., & Semarang, U. N. (2024). *KONSTRUKSI REALITAS PADA MEDIA MASSA DETIK . COM DALAM Puncak semarak demokrasi melalui kegiatan Pemilu Presiden Indonesia periode 2024-2029 menarik banyak perhatian dan perbincangan publik . Menjelang dilaksanakannya pemilu pilpres mengenai pencalonan ca*. 13(1), 1–10.